

ABSTRAK

M. Ilyas Hawary. *Perbedaan Pemikiran Antara Isa Anshary dan E. Abdurrahman Tentang Persis dan Politik (1960-1962).*

Persatuan Islam (Persis) didirikan di Bandung, 12 September 1923. Bermula dari kenduri yang membahas mengenai bidang keagamaan, Persis tampil sebagai salah satu ormas pembaharu yang aktif memberantas *takhayyul*, *bid'ah*, dan *khurafat* di Indonesia. Persis juga tercatat aktif dalam perjuangan menuju kemerdekaan, salah satunya sebagai anggota Partai Masyumi. Pasca dibubarkannya Masyumi pada 1960, Isa Anshary sebagai tokoh Persis yang sebelumnya aktif di Masyumi berinisiatif menjadikan Persis sebagai partai politik yang meneruskan perjuangan Partai Masyumi. Prasaran yang ia kemukakan dalam Mukhtamar VII di Bangil mendapat penolakan dari peserta sidang, dan dibuatlah tim formatur untuk merancang kepemimpinan Persis selanjutnya. Sayangnya, pimpinan bentukan tim formatur kembali ditolak oleh cabang-cabang Persis serta menyatakan berlepasnya cabang tersebut dari naungan PP. Persis. Dua tahun berselang, diadakanlah sidang referendum dan terpilihlah E. Abdurrahman sebagai Ketua Umum yang mengembalikan keutuhan PP. Persatuan Islam.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut; *Pertama*, bagaimana gambaran umum Persis tahun 1960? *Kedua*, bagaimana terjadinya polemik antara Isa Anshary dan E. Abdurrahman pada tahun 1960-1962?

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, yaitu model penelitian yang mempelajari peristiwa di masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan. Metode penelitian ini dilakukan dalam empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa: *Pertama*, Persis pada tahun 1960 sedang mengalami kegoncangan pasca dibubarkannya Masyumi. Inisiatif Isa Anshary untuk menjadikan Persis sebagai partai politik ditolak oleh 95% peserta sidang Mukhtamar VII di Bangil. *Kedua*, pasca Mukhtamar VII di Bangil, terjadi polemik antara pimpinan rancangan tim formatur dengan pimpinan terpilih dalam sidang referendum. Polemik itu antara lain adalah aksi saling diam antara E. Abdurrahman dan A. Qadir Hassan (Ketua Majelis Ulama Persis), penolakan kepemimpinan E. Abdurrahman oleh pimpinan rancangan tim formatur sehingga mereka mengadakan kegiatan sendiri di luar Persis, *schorsing* yang dijatuhkan kepada Rusyad Nurdin (berdasarkan himbauan E. Abdurrahman agar anggota Persis tidak berkecimpung di dunia politik) tanpa ada penyelesaian sampai akhir hayatnya.